



# Serapan Anggaran Terganggu

**A**nggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Maman Firmansyah, mengatakan penolakan Kementerian Dalam Negeri untuk mengoreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 bisa berdampak terhadap serapan anggaran.

Menurut dia, dalam rentang waktu yang hanya sekitar 11 bulan, pemerintah DKI bakal kekurangan waktu untuk merealisasi kegiatannya. Walhasil, serapan anggaran bisa saja jeblok seperti tahun lalu. "Tahun lalu saja hanya 40 persen yang terserap. Sisa lebih anggaran jadi banyak," katanya.

## Pembahasan APBD DKI 2015 memakan waktu yang cukup lama.

Berikut ini risalahnya:

### Juni 2014

Pemerintah mengajukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPS) untuk RAPBD 2015.

### 9 Oktober 2014

Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik, mengklaim belum terima draf APBD.

### 14 Oktober 2014

Draf APBD belum dibahas karena DPRD belum bentuk alat-alat kelengkapan Dewan.

### 8 Desember 2014

Alat kelengkapan DPRD disahkan.

### 2 Januari 2015

Dimulainya pembahasan RAPBD 2015 di tingkat komisi.

### 27 Januari 2015

DPRD menyetujui APBD DKI 2015.

### 7 Februari 2015

Kementerian Dalam Negeri menolak mengoreksi APBD DKI Jakarta 2015.

### Nilai APBD:

**Rp 73 triliun**

### Program unggulan:

Penanggulangan banjir, pembangunan rumah susun sewa, dan pembenahan transportasi:

**Rp 13,6 triliun**

### Anggaran pendidikan:

**Rp 19,7 triliun**

### Dana bantuan dan hibah:

**Rp 7,2 triliun**